

pendekatan dalam menginterpretasi kebudayaan. Tidak hanya terbatas pada pameran, narasi dalam museum-museum tersebut dikomunikasikan melalui bermacam-macam cara yang memudahkan interaksi sosial dan kenangan diantara pengunjungnya. Kerangka pedagoginya dibangun berdasarkan pada beragam kebutuhan dan cara belajar yang berbeda-beda.



BAB 3

Museum di Indonesia

3.1. Museum di Negara-Negara Berkembang

Negara-negara yang dikategorikan menjadi negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga dianggap memiliki karakteristik yang serupa. Karakteristik yang membedakan mereka dari negara-negara maju adalah status poskolonial mereka, ketergantungan pada kapitalisme Barat, kemiskinan dan 'keterbelakangan' ekonomi, kecenderungan terhadap kekuasaan otoriter, kurangnya stabilitas, korupsi dan meningkatnya politik identitas etnis dan keagamaan.¹¹⁵ Istilah negara dunia ketiga diciptakan oleh Nehru di tahun 1950 sebagai acuan pada negara-negara non-blok. Namun selama beberapa dekade, seperti yang telah digambarkan sebelumnya, istilah tersebut kini mengandung konotasi negatif.¹¹⁶ Seiring dengan munculnya teori poskolonial¹¹⁷, penggunaan istilah dunia ketiga pada beberapa negara juga kemudian dipertanyakan.¹¹⁸ Sepanjang Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia, negara-negara berkembang ini memiliki banyak permasalahan yang harus diatasi. Mereka masih harus berjuang menghadapi populasi yang terus meningkat, kelaparan, kemiskinan, kurangnya pendidikan, pengangguran, konflik etnis dan agama dan lain-lain.

Pendirian museum di negara-negara berkembang biasanya merupakan warisan dari masa pendudukan kolonial di masa lalu. Kolonialisme dan imperialisme Eropa merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya difusi museum di seluruh dunia. Model museum Eropa yang diperkenalkan oleh kolonialisasi di beberapa bagian di dunia dibawa dengan konsep keteraturan dunia.¹¹⁹ Pendirian museum di wilayah kolonial ditandai oleh para kolonialis yang pertama mengoleksi spesimen sejarah alam dan benda-benda primitif yang bisa mereka pelajari dan mereka atur dalam urutan tertentu. Jika kita melihat premis pendirian museum sejarah alam Eropa, tujuannya adalah untuk menaruh masyarakat Barat di tempat teratas dalam tingkatan

¹¹⁵ Peter Burnell dan Vicky Randall, eds., 'Introduction', *Politics in the Developing World*, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2008, 1-11, hlm.3-4.

¹¹⁶ Richard Ingersoll, 'The Third World Is Dead, Long Live the Third World', Conference Review, *Journal of Architectural Education*, vol. 44 no. 4. Berkeley: Blackwell Publishing, 1991, 245-247, hlm.245. <http://www.jstor.org.ezproxy.lib.le.ac.uk/stable/pdfplus/1425150.pdf>, 6 November 2008.

¹¹⁷ Istilah poskolonial semakin sering digunakan untuk menggambarkan sebuah bentuk kritik sosial yang menyaksikan ketidaksetaraan proses representasi pengalaman kesejarahan dari negara-negara dunia ketiga dalam kerangka Barat. Homi Bhabha, "'Caliban Speaks to Prospero: Cultural Identity and the Crisis of Representation', Philomena Mariani, ed., *Critical Fictions: the Politics of Imaginative Writing*. Seattle: Bay Press, 1991. hlm. 62-65.

¹¹⁸ Gayatri C. Spivak, 'Poststructuralism, Marginality, Postcoloniality and Value', Padmini Mongia, ed., *Contemporary Postcolonial Theory : A Reader*. London: Arnold, 1996. hlm. 198-222.

¹¹⁹ Martin Prossler, 'Museums and Globalization', Sharon MacDonald and Gordon Fyfe, eds., *Theorizing Museums*. Oxford: Blackwell, 1996. 21-44, hlm. 22.

kehidupan alam.¹²⁰ Tentunya di atas penduduk lokal yang mana negaranya mereka duduki. Tony Bennet menyatakan bahwa pada pertengahan abad 19 di Eropa, ‘konsepsi arkeologis manusia’ (*the archaeological conception of the person*) mengajukan bahwa penduduk primitif atau lokal berada di tingkatan terendah dalam tangga evolusi manusia dan karena itu dianggap tidak mampu menjadi masyarakat yang beradab.¹²¹ Maka dalam masa pasca kemerdekaan, ‘museum’ yang mereka tinggalkan kehilangan landasan dan tujuannya. Hanya setelah beberapa dekade ketika wilayah-wilayah merdeka ini berkembang, masyarakat mereka mulai tumbuh dan mulai mengenali pentingnya museum. Museum di negara-negara yang baru merdeka tumbuh seiring dengan masyarakatnya yang mulai mempreservasi tradisi kebudayaan mereka, untuk mengembangkan identitas nasional dan yang paling penting untuk menyatukan seluruh kelompok suku dan linguistik yang berbeda.¹²²

Penguatan identitas budaya adalah salah satu isu utama setelah tempat tinggal dan makanan di negara-negara berkembang. Maka dari itu, museum di negara-negara ini dapat menjadi sarana yang potensial dalam mengembangkan identitas budaya¹²³ dan nasional. Museum dapat berfungsi sebagai basis identitas yang akan menolong masyarakat dalam menyadari kekuatan mereka yang dapat membawa menuju kemajuan.¹²⁴ Masalah identitas budaya merupakan hal yang krusial di negara-negara poskolonial. Seperti yang dikatakan oleh Stuart Hall, identitas tidak bersifat pasti melainkan sebuah proses yang tidak akan berhenti dan selalu terbentuk di dalam representasi. Maka dia menyatakan lebih lanjut bahwa terdapat dua cara dalam mendefinisikan sebuah identitas budaya. Pertama adalah sebagai jati diri kolektif yang serupa dimana sekelompok orang berbagi sejarah dan leluhur yang sama. Kedua adalah sebagai sebuah perbedaan signifikan yang mengacu pada alur sejarah, budaya dan kekuasaan. Berdasarkan sudut pandang yang kedua, dapatlah dimengerti bahwa pengalaman kolonial secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana negara-negara poskolonial ini membentuk dan melihat identitas budaya mereka. Para kolonialis dengan rezim representasi mereka menciptakan

¹²⁰ Stephen E. Weil, ‘The Museum and the Public’, Sheila Watson, ed., *Museums and Their Communities*. London: Routledge, 2007. hlm. 34

¹²¹ Tony Bennet, *Pasts Beyond Memory: Evolution, Museums, Colonialism*, hlm. 63.

¹²² Moira G. Simpson, ‘From Treasure House to Museum and Back’, hlm. 162.

¹²³ Lorena San Roman, ‘Politics and the Role of Museums in the Rescue of Identity’, Patrick Boylan, ed., *Museums 2000: Politics, People, Professionals and Profit*. London: Museums Association and Routledge, 1992. 25-41, hlm. 31.

¹²⁴ Tomislav Sola, *Essays on Museums and Their Theory*, hlm. 52-54.

penduduk asli sebagai sesuatu yang berbeda di dalam kerangka pengetahuan Barat. Maka para kolonialis memiliki kekuasaan untuk membuat penduduk asli melihat dan mengalami diri mereka sebagai 'yang lain' (*other*).¹²⁵

Identitas nasional adalah elemen lainnya yang masih sulit untuk didefinisikan oleh negara-negara poskolonial. Identitas nasional dibentuk secara artifisial dan dapat digambarkan melalui representasi budaya¹²⁶, maka museum bisa berfungsi sebagai instrumen yang tepat dalam pembentukan identitas nasional. Dalam mengambil bagian dalam menginterpretasi kebudayaan visual, museum juga dapat menyimbolkan dan mempertahankan kesadaran nasional kolektif dan menciptakan sebuah pandangan tentang pembentukan sejarah dan politik sebuah bangsa.¹²⁷ Lebih jauh lagi, objek museum merupakan dokumentasi bangsa yang terdiri dari kehidupan komunitas manusia sepanjang ruang dan waktu. Objek museum mewakili semua yang berada di dalam wilayah sebuah negara dan menjadi ilustrasi mikrokosmik bangsa tersebut.¹²⁸ Negara-negara berkembang membutuhkan museum untuk memperkuat identitas nasional mereka dan untuk memberi mereka status di dalam komunitas dunia.¹²⁹

Museum di negara-negara berkembang belum berhasil menjalankan perannya dalam merepresentasikan identitas nasional dan budaya. Di dalam konteks dimana masyarakat masih harus berjuang setiap hari untuk bertahan hidup, kesan museum sebagai pilar identitas belum diakui sebagai prioritas. Negara-negara berkembang sebagai negara yang masih dalam perkembangan dini memiliki hasrat untuk berkembang sebagai komunitas dengan peradaban tinggi, dan museum merupakan bukti dari sebuah peradaban besar yang mencerahkan masyarakat dan mencerminkan citra sebuah komunitas yang maju dan cerdas.¹³⁰ Oleh sebab itu,

¹²⁵ Hall menaruh negara-negara Afrika and Karibia sebagai contoh yang dapat menggambarkan identitas budaya di negara-negara poskolonial. Stuart Hall, 'Cultural Identity and Diaspora',

¹²⁶ Edward W. Said, *Orientalism*,

¹²⁷ Brian Wallis, 'Selling Nations: International Exhibitions and Cultural Diplomacy', Daniel J. Sherman and Irit Rogoff, eds., *Museum Culture: Histories, Discourses, Spectacles*. London: Routledge, 1994. hlm. 265-282.

¹²⁸ Martin Prosser, 'Museums and Globalization', hlm. 35.

¹²⁹ Kenneth Hudson and Ann Nicholls, *Directory of Museums and Living Display*. London: MacMillan, 1985. hlm. x.

¹³⁰ Persyaratan museum pada akhir abad 19 di Eropa seperti yang dikatakan George Brown Goode. Museum memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh setiap masyarakat cerdas dan mengisi kebutuhan yang tidak bisa diberikan oleh sarana lain. Museum tidak akan berdiri kecuali di tengah-tengah rakyat yang tercerahkan dan museum berada dalam perkembangan tertingginya hanya dalam peradaban besar. George Brown Goode, 'Relationships and Responsibilities of Museums', in Hugh G. Genoways dan Mary Anne Andrei, eds.,

negara-negara berkembang merasa perlu untuk mengembangkan museum mereka sesuai dengan nilai-nilai museum internasional. Melainkan memperkuat identitas untuk inspirasi, museum di negara-negara berkembang masih mengimpor model museum Barat yang kemudian tidak bisa berfungsi dengan semestinya.¹³¹ Maka museum-museum tersebut seharusnya dapat berubah agar dapat beradaptasi pada berbagai latar belakang dan berbagai pemahaman lokal. Sebagai tambahan, Corinne A. Kratz dan Ivan Karp menyatakan adanya ‘budaya museum’ dan mengajukan bahwa setiap museum seharusnya memiliki ‘idiom lokal’. Pemikiran tersebut didasarkan pada beberapa hal, seperti memperhatikan audiens dan unsur lokal, pemahaman terhadap identitas dan pengenalan pasar bebas. ‘Idiom lokal’ tampaknya akan sulit untuk didefinisikan di tengah pesatnya perkembangan nilai-nilai transnasional dan global di masa kini.¹³² Meskipun begitu, museum di beberapa bagian di dunia telah mengaplikasikan ‘idiom lokal’ ini dan membangun ulang museum di daerah masing-masing.¹³³

‘Idiom lokal’ perlu dibangun karena museum di negara-negara berkembang hingga saat ini hanya melayani turis dan orang asing. Komunitas sekitar mereka belum mendapatkan manfaat dari keberadaan museum. Seperti yang diajukan oleh Molly Harrison, museum di negara-negara berkembang seharusnya bisa menjadi lambang kebanggaan nasional, menjadi pusat penelitian bagi identitas masyarakat, dan sebuah bank data warisan budaya dan sebagai sarana pertahanan preservasi warisan budaya.¹³⁴ Untuk mencoba menjadi museum yang ‘ideal’ di negara-negara berkembang bukan merupakan proses yang mudah. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, seperti karakteristik museum, nilai-nilai internasional dalam teori dan praktik museum, konteks yang mengitari pertumbuhan museum dan karakter khusus negara berkembang.

Museum Origins: Readings in Early Museum History and Philosophy. Walnut Creek: Left Coast Press, 2008. 111-124, hlm. 115.

¹³¹ Tomislav Sola, ‘Discussion in Politics and the Role of Museums in the Rescue of Identity’, Patrick Boylan, ed., *Museums 2000: Politics, People, Professionals and Profit*. London: Museums Association and Routledge, 1995. 25-41, hlm. 34-35.

¹³² Corinne A. Kratz dan Ivan Karp, ‘Introduction’,

¹³³ Perkembangan ‘*Culture Houses*’ developments di Zimbabwe dan museum-museum di India. Peter J. Ucko, ‘Museums and Sites: Cultures of the Past Within Education – Zimbabwe, Some Ten Years On’, Peter G. Stone dan Brian L. Molyneaux, eds., *The Presented Past: Museums and Heritage in the Post-Modern World*. London: Routledge, 1994. hlm. 237-282, dan Arjun Appadurai dan Carol Breckenbridge, ‘Museums Are Good To Think: Heritage on View in India’,

¹³⁴ Molly Harrison, *Education in Museum*, Museums and Monument Series IX hlm. 92 in Tomislav Sola, *Essays on Museums and Their Theory*, hlm. 57.

3.2. Karakteristik Museum di Indonesia

Republik Indonesia terletak di Asia Tenggara dan dikategorikan sebagai negara berkembang. Indonesia memiliki 17.508 pulau¹³⁵, memanjang dari ujung Asia Tenggara hingga pantai barat Australia.¹³⁶ Indonesia memiliki populasi terpadat keempat di dunia¹³⁷ dengan hanya \$1,650 sebagai pendapatan nasional per kapita.¹³⁸ Dengan memiliki lebih dari 500 kelompok etnis, Indonesia juga dikategorikan sebagai negara dengan beragam kebudayaan, dengan lebih dari satu dimensi perbedaan.¹³⁹ Selain itu juga terdapat populasi lain yang sebagian besar terdiri dari keturunan Cina, India dan Arab. Mereka telah datang ke Indonesia sejak masa awal peradaban Indonesia dan telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Islam adalah mayoritas agama yang dipeluk di Indonesia dengan persentase sekitar 85,2 %, yang membuat Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Sementara sisa dari populasi lainnya memeluk agama Protestan (8,95), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan kepercayaan lainnya (0,3%). Meskipun Indonesia memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya, rakyat Indonesia dalam proporsi yang besar masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-harinya. Dikarenakan wilayahnya yang luas, wilayah Indonesia terbagi menjadi propinsi-propinsi. Saat ini, terdapat 33 propinsi dengan gubernur sebagai kepala daerah. Sementara ekonomi Indonesia sebagian besar bergantung pada ekspor dan pariwisata.¹⁴⁰

Sejarah Indonesia terbentang dari masa prasejarah hingga masa kolonialisasi Eropa dan Jepang. Sejarah Indonesia yang panjang menyebabkan terjadinya percampuran kebudayaan yang

¹³⁵Edward Aspinall, "Indonesia: Coping with Fragmentation", 'Disintegration or Nation-Building', Peter Burnell, ed., *Politics in the Developing World*, hlm. 399-411, hlm. 401.

¹³⁶http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722H,5 Juli 2009.

¹³⁷Sekitar 228.249.000 jiwa menurut Populasi Dunia 2007, <http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/POP.pdf>H,7 November 2008.

¹³⁸Pendapatan per kapita 2007, <http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf>H, 7 November 2008.

¹³⁹ James R. Scarrit, 'Ethnopolitics and Nationalism', Peter Burnell, ed., *Politics in Developing World*, hlm. 111-127, hlm. 118.

¹⁴⁰ Dengan pendapatan sekitar 7.377, 39 juta US dollar di tahun 2008.

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722H, 5 Juli 2009.

terlihat dari aspek arsitektur, bahasa, seni dan tradisi. Di antara seluruh periodisasi sejarah tersebut, hanya masa kolonialisasi Belanda yang membentuk karakteristik museum di Indonesia.

Sebelum menjelaskan konteks museum di Indonesia, sebelumnya akan digambarkan bagaimana pemerintah kolonial Belanda memperlakukan Indonesia dalam cara tertentu sehingga turut mempengaruhi karakteristik museum. Benedict Anderson menyatakan bahwa museum adalah salah satu di antara tiga institusi selain sensus dan peta yang secara intens membentuk cara sebuah wilayah kolonial membayangkan negara penjajahnya sebagai cerminan. Terdapat tiga unsur yang menandai bagaimana negara kolonial seperti Indonesia mencari cerminan pada negara penjajah nya, yang terdiri dari kondisi alamiah manusia yang dikuasai, geografi wilayahnya dan legitimasi akan asal usulnya. Sebagai permulaan, karena Anderson juga mengajukan bahwa sebuah negara merupakan sebuah cerminan komunitas politis, kedaulatan Indonesia pertama kali dibayangkan di dalam struktur rasis Hindia Belanda pada awal abad 20. Maka asal usul pendirian museum di Indonesia sendiri bersifat politis. Proses pendirian museum dipengaruhi oleh pembentukan arkeologi kolonial pada saat itu. Prestise Indonesia sebagai sebuah wilayah kolonial dikaitkan pada negara superiornya, yaitu Belanda. Rezim kolonial Belanda melibatkan diri pada kepurbakalaan sedalam mereka melibatkan diri pada penaklukan¹⁴¹. Monumen-monumen kuno seperti Borobudur dan Prambanan dimuseumisasikan¹⁴², dimasukkan ke dalam peta koloni, diatur berdasarkan keinginan koloni dan diposisikan ulang sebagai simbol kekuasaan untuk sebuah negara kolonial sekuler. Monumen-monumen kuno yang dimuseumisasikan tersebut kemudian menjadi simbol kekuasaan negara. Perilaku museumisasi politis ini diwarisi oleh Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hingga kini, Indonesia masih mempertahankan sudut pandang kolonial dalam melihat segala sesuatu yang menyimbolkan negara.¹⁴³ Maka museum pun dilihat sebagai monumen negara yang menyimbolkan kekuasaan.

¹⁴¹ Benedict Anderson, *Imagined Communities, revised edition*. London: Verso, 2006.

¹⁴² Di tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi Kepurbakalaan atau *Oudheidkundige Commissie*. Komisi ini berfungsi untuk melakukan survei, merekam dan mengelola setiap monumen kuno di wilayah kolonialnya. N.J. Krom, *Inleiding tot de Hindoe-Javansche Kunst, second revised edition*. The Hague: Nijhoff, 1923.

¹⁴³ *Op Cit.*,

Beberapa pengamat menyatakan bahwa Indonesia modern masa kini merupakan ciptaan superfisial dari Belanda daripada sebuah negara utuh yang bersatu berdasarkan faktor-faktor tertentu yang mengikat.¹⁴⁴ Namun Ricklefs menyanggah bahwa Belanda tidak menciptakan Indonesia, mereka hanya menciptakan daerah teritorialnya saja. Sekitar tahun 1910, tentara kolonial Belanda telah membuat batasan-batasan dari wilayah Indonesia kini. Mereka menaruh dasar sebuah negara baru yang disatukan selama berabad-abad melalui tradisi budaya dan politik yang sama dan oleh pengalaman imperialisme Belanda. Walaupun begitu, pada masa pasca kemerdekaan setelah 1945, rakyat Indonesia masih terpecah-pecah satu sama lain. Latar belakang etnis masih berakar sangat kuat. Identitas tunggal dan bersama bangsa Indonesia belum muncul.¹⁴⁵ Identitas Indonesia, baik itu nasional maupun budaya masih merupakan permasalahan yang harus diatasi. Kesatuan negara dan kurangnya kohesi sosial juga merupakan bagian dari isu identitas. Sebagai negara yang baru merdeka, Republik Indonesia menciptakan semboyan, *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti 'Berbeda-beda tapi Tetap Satu'. Semboyan tersebut sejauh ini hanyalah sebatas ucapan belaka. Terdapat beberapa faktor dalam keragaman di Indonesia yang belum berubah hingga kini. Pertama adalah faktor geografis, etnis dan budaya yang membuat satu daerah serupa dengan atau sama sekali berbeda dengan daerah lain. Kedua adalah perbedaan yang mencolok antara jenis aktifitas ekonomi di Indonesia. Ketiga adalah pembagian horisontal yang berpengaruh pada kesatuan sosial.¹⁴⁶ Keempat adalah faktor perbedaan agama yang secara halus dan terkadang masih menimbulkan konflik. Kesemua faktor ini menjadi bagian dalam kompleksitas kondisi Indonesia modern.

Bentuk museum pertama di Indonesia sebenarnya diawali oleh koleksi spesimen ilmiah dan karya seni yang dikumpulkan oleh seorang pejabat VOC bernama G.E. Rumphius. Dia membuat koleksinya terkenal di kalangan bangsa Belanda dan menamainya *De Ambonsch Rairteitenkamer* di tahun 1662. Sayangnya tidak ada catatan tertulis yang ditemukan tentang perkembangan koleksi tersebut. Pendirian berikutnya adalah ketika beberapa intelektual Belanda membentuk *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Westenschappen* di tahun 1778.¹⁴⁷

¹⁴⁴ J.D. Legge, *Indonesia*. Sydney: Prentice Hall, 1980. hlm. 3.

¹⁴⁵ Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*, 2nd edition. London: Macmillan Press Ltd, 1993., hlm. 147.

¹⁴⁶ *Op Cit*, hlm. 4.

¹⁴⁷ Direktorat Museum, *Pedoman Pengelolaan Museum*. Jakarta: Direktorat Jendral of Sejarah dan Arkeologi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007. hlm. 2.

Seperti Rumphius, kelompok ini juga mengumpulkan berbagai objek seni, budaya dan ilmiah dari seluruh kepulauan Indonesia. Mereka ingin mempromosikan penelitian di bidang seni dan sains, terutama di bidang sejarah, arkeologi, etnografi dan fisika, dan mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya tersebut. Di tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun museum yang dapat menyimpan, merawat dan memamerkan koleksi kelompok ini. Maka museum tersebut pun dibuka secara resmi di tahun 1868 dan di tahun 1962 diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan menjadi Museum Pusat. Dengan dekrit Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.092/0/1979 28 Mei 28 1979 museum berganti nama menjadi Museum Nasional.¹⁴⁸

Selama masa pendudukan Belanda, juga didirikan beberapa museum di Indonesia, yaitu Museum Aceh di tahun 1915, Museum Mpu Tantular di tahun 1922, Museum Bali di tahun 1932 dan Museum Sonobudoyo di tahun 1935.¹⁴⁹ Ketika pertama kali didirikan, mereka masih berfungsi sebagai lembaga yang mendukung kepentingan pemerintah Belanda.¹⁵⁰ Setelah masa kemerdekaan, konsep museum sebagai sebuah institusi yang didasari oleh pengetahuan dan kebudayaan kemudian dipertahankan. Perkembangan museum di Indonesia menjadi kuat ketika pemerintah Indonesia membentuk Direktorat Permuseuman di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁵¹ Adanya perubahan politik yang terus berubah-ubah, maka kebijakan pemerintah mengalami penyesuaian selama beberapa kali. Hal yang sama juga terjadi pada Direktorat Permuseuman yang memiliki nama yang berbeda dan berada di posisi yang berbeda di dalam pemerintahan. Maka dari tahun 2005 hingga kini, namanya menjadi Direktorat Museum dan berada di bawah wewenang Direktorat Jendral Sejarah dan Arkeologi, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.¹⁵² Dalam kedudukannya yang terbaru, Direktorat Museum bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di sektor museum.¹⁵³ Kini terdapat kurang lebih 268

¹⁴⁸ [Hhttp://www.museum-nasional.com/H](http://www.museum-nasional.com/H), 7 November 2008.

¹⁴⁹ *Op cit*,

¹⁵⁰ Christina F. Kreps, *Liberating Culture: Cross-Cultural Perspectives on Museums, Curation, and Heritage Preservation*. London: Routledge, 2003. hlm. 24.

¹⁵¹ Amir Sutaarga, *Introduction to Museums in Indonesia*, The International Council of Museums National Committee in Indonesia. Jakarta: Direktorat Museum, 1987. hlm. 4.

¹⁵² [Hhttp://www.museum-indonesia.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=33](http://www.museum-indonesia.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=33)H, 8 November 2008.

¹⁵³ [Hhttp://www.museum-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=65](http://www.museum-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=65)H, 8 November 2008.

museum di Indonesia yang seluruhnya dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah dan oleh swasta.¹⁵⁴ Dalam *website* Direktorat Museum, dinyatakan bahwa terdapat dua sumber kebijakan yang digunakan, yaitu Kode Etik *International Council of Museum* (ICOM) dan Pedoman Pengelolaan Museum.¹⁵⁵ Indonesia termasuk ke dalam anggota ICOM dan mengikuti definisi museumnya dan sebagian besar kebijakannya. Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa asosiasi museum, yaitu Asosiasi Museum Indonesia, Badan Musyawarah Musea dan Paramita Jaya. Namun gaungnya belum begitu kuat dan belum cukup berperan dalam pengelolaan museum di Indonesia.

Direktorat Museum mengeluarkan beberapa pedoman untuk praktik museum di Indonesia. Pedoman yang terbaru adalah Pedoman Pengelolaan Museum yang diterbitkan tahun 2007. Di dalam pedoman tersebut, kita bisa melihat bagaimana pemerintah melihat keberadaan museum. Pemerintah Indonesia mengenali pentingnya museum dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembelajaran, meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap warisan budaya dalam rangka meningkatkan identitas dan kebanggaan nasional. Di sisi lain, mereka cukup menekankan peranan museum dalam merawat dan mengkomunikasikan berbagai warisan budaya Indonesia sebagai salah satu aset dari pariwisata. Mereka percaya bahwa museum juga telah menjadi jendela dalam memperkenalkan kebudayaan sebuah negara dan sebagai tempat untuk memamerkan koleksi yang menarik dan bernilai tinggi. Mereka juga melihat museum sebagai sebuah *landmark* dari suatu daerah dan menjadi destinasi wisata sehingga setiap daerah wajib memiliki museum. Tugas dan fungsi museum dinyatakan untuk melayani penyajian informasi kepada masyarakat dalam rangka pembelajaran dan peningkatan apresiasinya.¹⁵⁶

Terdapat dua dimensi yang memiliki efek langsung pada sektor museum di Indonesia, yaitu dimensi politik dan ekonomi. Sejauh ini, dimensi politik adalah pengaruh utama terhadap segala perubahan dan perkembangan di bidang museum, terutama bagi museum negeri. Dalam hal ini, terdapat dua aspek dari dimensi politik yang mempengaruhi karakteristik dan

¹⁵⁴ Direktorat Museum, *Pedoman Pengelolaan Museum*, hlm. 2.

¹⁵⁵ [Hhttp://www.museum-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=67](http://www.museum-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=67)H, 6 Juli 2009.

¹⁵⁶ Direktorat Museum, *Pedoman Pengelolaan Museum*,

perkembangan museum secara keseluruhan. Dua aspek tersebut adalah kontrol pemerintah terhadap museum negeri dan prosedur resmi pemerintah atau birokrasi.

Pada tahun 1999, sebagai akibat dari berubahnya pemerintahan dan kebijakan, pemerintah mengeluarkan peraturan otonomi baru yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah dalam mengatur propinsi, kota dan kabupaten masing-masing.¹⁵⁷ Sebagai akibat dari otonomi daerah, semakin banyak propinsi baru yang ingin membangun museum mereka sendiri sebagai kebanggaan daerah. Dengan bernaung di bawah nama otonomi, pemerintah daerah memiliki rasa memiliki yang lebih kuat terhadap daerahnya dan mereka sebenarnya ingin memperkuat identitas daerah mereka. Mereka juga dapat membuat dan memiliki seluruh sumber daya daerah, baik itu sumber daya alam, ekonomi, budaya dan pariwisata. Namun yang banyak terjadi adalah museum daerah yang didirikan oleh pemerintah tidak cukup merepresentasikan seluruh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Dengan sumber dayanya, pemerintah daerah mendirikan museum tanpa tujuan dan petunjuk yang jelas. Maka banyak museum daerah yang kini hanya berdiri sebagai sebuah *landmark* simbolis dari daerah mereka.

Terdapat aspek lainnya yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kebijakan museum. Sebagai konsekuensi lainnya dari wewenang penuh pemerintah daerah, museum propinsi atau kota harus sesuai dengan peraturan dan tindakan pemerintah. Dimulai dari kebijakan yang paling umum hingga pada aspek yang terkecil, semuanya harus sejalan dengan peraturan. Dengan kata lain pemerintah telah menetapkan tugas pokok dan fungsi museum yang tidak bisa dilanggar oleh museum.

Jika kita berpikir tentang kontrol pemerintah terhadap museum, maka logikanya adalah karena museum didanai oleh pemerintah maka museum seharusnya mengacu kepada pemerintah sepenuhnya. Namun museum juga merupakan institusi publik yang memiliki akuntabilitas publik, museum memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan perkembangannya seharusnya disebabkan dan ditujukan kepada masyarakat yang dilayaninya. Maka dari itu museum di

¹⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-13-1049-11082006.pdf>, 8 November 2008.

Indonesia memiliki tugas yang tidak mudah untuk terus berkembang bersama masyarakat namun juga tetap berada dalam jalur kebijakan pemerintah.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih harus berurusan dengan kemiskinan dan pengangguran dalam skala besar. Mungkin karena itu pemerintah belum memberi perhatian yang cukup besar pada sektor budaya dan karena Direktorat Museum berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, museum di Indonesia turut termarjinalisasikan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dari Departemen Keuangan, dari tahun 2005-2008 pemerintah hanya mengalokasikan tidak lebih dari 1% dalam anggaran mereka pada sektor budaya. Hal yang sama terjadi pada rencana anggaran 2008-2009, ketika pemerintah menyatakan akan berfokus pada kemiskinan, kesejahteraan dan perkembangan. Sementara sektor pariwisata diberikan bagian anggaran yang lebih besar dari sektor budaya.¹⁵⁸ Hal tersebut dikarenakan pariwisata adalah sektor penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia dan pemerintah tampaknya selalu berpikir bahwa kebudayaan adalah pariwisata. Pemerintah juga selalu melihat museum sebagai aset yang dapat memberikan pendapatan regional, karena seluruh museum negeri menarik biaya masuk. Hal tersebut tidaklah salah karena museum yang baik akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, baik secara materi dan non-materi. Museum-museum maju di luar Indonesia sudah menjadi destinasi wisata dari seluruh dunia. Dengan begitu, mereka tidak hanya memberi kontribusi bagi masyarakatnya tetapi juga pada negaranya. Namun museum di Indonesia belum siap untuk menjadi seperti itu. Museum belum memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar, apalagi kepada negara. Walaupun terdapat beberapa contoh kasus dimana museum telah memberi kontribusi yang nyata pada masyarakat, namun itu pun terjadi karena program inisiatif dari pihak luar Indonesia.¹⁵⁹

Jika kita kembali pada rancangan anggaran pemerintah Indonesia, mereka menyatakan bahwa mereka akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

¹⁵⁸ Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Departemen Keuangan Republik Indonesia, (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/download/NK%20dan%20RAPBN%202009.pdf>), 8 November 2008.

¹⁵⁹ Program Pengembangan Museum Propinsi Kalimantan Tengah dan Museum Kayan Mentarang, Christina F. Kreps, *Liberating Culture*, hlm. 22-45 dan hlm. 114-144.

dan perkembangan rakyat. Sudut pandang mereka sudah jelas dilatari oleh indikator ekonomi. Di sisi lain, kebudayaan juga adalah bagian dari perkembangan di dalam sebuah negara. Seperti yang dinyatakan oleh Christina F. Kreps bahwa perkembangan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa pengakuan kekuatan kebudayaan, karena kebudayaan merepresentasikan totalitas dari kerangka hidup rakyat.¹⁶⁰ Hal ini berarti bahwa sektor kebudayaan seharusnya tidak dipandang sebelah mata dan dilewatkan dalam agenda perkembangan negara. Jika pemerintah tetap menganggap kebudayaan sebagai sektor tambahan, kondisi museum di Indonesia yang stagnan tampaknya tidak akan membaik.

Dalam membicarakan konteks sekitar museum, tentunya regulasi dan kebijakan pemerintah sebagai pedoman konsep dan pengelolaan museum juga harus diperhatikan. Seperti sudah disebutkan tadi, Direktorat Museum mengadopsi kebijakan ICOM dalam pedoman pengelolaan museum namun disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan sudut pandang pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1995 menyatakan museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda bukti materil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.¹⁶¹ Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, bisa terlihat kata-kata kunci yang menggambarkan museum di Indonesia, yaitu penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan untuk melindungi dan melestarikan budaya bangsa. Hal itu mengindikasikan bahwa museum di Indonesia memang belum dilihat sebagai sebuah institusi pendidikan atau institusi yang berkaitan dengan pendidikan. Museum masih dilihat sebagai institusi pelestarian budaya bangsa.

Dalam kaitannya dengan museum sebagai institusi pendidikan masyarakat yang memfasilitasi pembelajaran, perlu dilihat Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang tersebut tertera dalam Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, bahwa:

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 116-117.

¹⁶¹ Direktorat Museum, *Pedoman Pengelolaan Museum*,

- a. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan

Pada Pasal 2 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa:

- a. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- b. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.¹⁶²

Jika melihat aspek pertama, museum bisa termasuk ke dalam sumber daya pendidikan, tidak hanya sebagai sarana penyimpanan, perawatan dan pemanfaatan hasil budaya manusia yang selama ini dilihat oleh pemerintah. Museum bisa memiliki tenaga kependidikan yang lebih dikenal dengan nama *learning officer* yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran tertentu, seperti *learning officer* untuk setiap jenjang pendidikan, untuk kebutuhan khusus, untuk pendidikan usia dini atau untuk masyarakat umum. Masyarakat, dana, sarana dan prasarana sudah tentu saja bisa disediakan oleh museum sebagai institusi pendidikan publik. Sementara di dalam Undang-Undang, pendidikan sudah dianggap sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat atau *lifelong learning*. Sebagai tambahan, pendidikan dianggap sebagai suatu kesatuan dengan sistem terbuka dan multimakna. Dari kedua pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya museum dengan setiap karakteristiknya bisa turut mendukung pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Pembelajaran di museum adalah pembelajaran sepanjang hayat dan idealnya bersifat terbuka dan multimakna. Begitu juga dengan pengertian pembelajaran yang menekankan aspek interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar, dan semuanya itu bisa terjadi di museum. Namun sayangnya pendidikan informal dalam Undang-Undang ini lebih dimaksudkan ke dalam

¹⁶² Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

pendidikan yang sesuai dengan kerangka pendidikan formal yang dilakukan dalam keluarga dan lingkungan. Padahal berdasarkan pasal-pasal sebelumnya, pembelajaran di museum bisa dikategorikan juga ke dalam pendidikan informal.

Dalam Pedoman Pengelolaan Museum, edukasi di museum termasuk ke dalam ranah pelayanan publik. Menurut pedoman, pelayanan publik adalah upaya untuk memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat dalam pelayanan informasi, pemanfaatan museum, maupun peran sertanya dalam pengembangan museum, sesuai dengan tugas dan fungsi museum. Strategi pelayanan publik museum dilakukan melalui kegiatan bimbingan edukasi, publikasi, promosi, dan hubungan masyarakat. Bimbingan dan edukasi di museum meliputi pemanduan dan pengelolaan pengunjung. Bimbingan dan edukasi tersebut bisa berupa ceramah, pemutaran film, bimbingan karya tulis, pameran khusus untuk anak, *hands on activity*, dan lokakarya atau seminar.¹⁶³ Berdasarkan pedoman ini, aspek edukasi yang diimplementasikan dalam istilah kegiatan bimbingan edukasi berada dalam payung strategi pelayanan publik dan disejajarkan dengan publikasi, promosi dan hubungan masyarakat. Memang tidak ada yang salah dalam pengkategorian itu, namun dengan begitu, pelaksanaan edukasi di museum tentunya menjadi terbatas dan berada di dalam kerangka pelayanan publik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa edukasi di museum lebih luas dan bisa mencakup semua aspek di dalam konsep dan pengelolaan museum sehingga bimbingan edukasi secara mendasar bisa berdiri sendiri di luar ranah pelayanan publik. Namun di sisi lain, dalam kegiatan bimbingan edukasi sudah disebutkan pameran khusus untuk anak dan *hands on activity* yang menekankan pada proses belajar interaktif dan berfokus pada kebutuhan pengunjung yang berbeda-beda.

Di dalam Pedoman Pengelolaan Museum juga tersirat pandangan yang masih berdasarkan koleksi dalam menyajikan pameran, tidak melihat dari sudut pandang informasi yang terkandung di dalam koleksi. Hal itu dapat menyebabkan keterbatasan dalam mengeksplor kemungkinan dan pendekatan-pendekatan dalam menyajikan sebuah tema dalam pameran. Maka aspek tata pameran dan pameran diimplementasikan dalam istilah penyajian koleksi. Pedoman Pengelolaan Museum menyatakan terdapat faktor-faktor pendukung penyajian koleksi yang

¹⁶³ Direktorat Museum, *Pedoman Pengelolaan Museum*, hlm. 75-80.

terdiri dari pengelola museum, koleksi museum, pengunjung museum dan sarana dan prasarana museum. Dikatakan bahwa pengunjung museum memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan perbedaan tingkat ketertarikan dan pemahaman pengunjung terhadap koleksi yang disajikan. Berdasarkan keterangan tersebut jelas bahwa keberadaan pengunjung sebagai target dari penyajian koleksi sudah diakui secara signifikan. Pengunjung pun sudah dianggap sebagai individual-individual berbeda yang memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda. Dari sudut pandang tersebut, seharusnya penyajian pameran di museum sudah bisa menerapkan metode dan pendekatan yang berbeda-beda pula sehingga dapat memfasilitasi setiap kebutuhan pengunjung.

Selain pandangan pemerintah terhadap museum yang terlihat dari kebijakan, regulasi dan pedoman pemerintah, pandangan masyarakat juga merupakan unsur yang tidak dapat dikesampingkan dalam perkembangan museum. Meskipun belum mewakili masyarakat Indonesia secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Peran dan Pengelolaan Museum, dapat diketahui bahwa:

- a. Pandangan masyarakat berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan khususnya sekolah menengah umum dan sederajat, mengartikan museum sebagai pusat informasi sejarah dan pendidikan. Kelompok masyarakat umum dan siswa pendidikan sekolah menengah pertama melihat arti museum dari segi fungsi dasar berkaitan dengan koleksi.
- b. Pandangan masyarakat dalam kondisi kekinian museum dinilai kurang baik, manfaat berkunjung ke museum sangat rendah untuk mendapatkan pengetahuan baru. Sementara harapan berkunjung untuk mendapatkan pengetahuan benda dan koleksi sangat tinggi.
- c. Pengamatan masyarakat terhadap kondisi museum saat ini salah satunya adalah kurangnya pelayanan informasi oleh museum. Pengunjung lebih tertarik pada benda-

benda yang dipamerkan, khususnya benda-benda yang berbeda dengan kebudayaan mereka.¹⁶⁴



¹⁶⁴ Penelitian dilakukan di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung; Kabupaten Sikka, NTT; dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, *Pandangan Masyarakat Terhadap Peran dan Pengelolaan Museum*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008.